

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 91 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN TIPOLOGI KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan kewenangan, peningkatan kinerja dan pemberdayaan kecamatan sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya penggolongan kecamatan yang didasarkan pada indikator sesuai dengan potensi dan perkembangan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - b. bahwa untuk penguatan pemerintahan di kecamatan, diperlukan penataan kembali mengenai tipologi kecamatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tipologi Kecamatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 51 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 67 Seri D.44);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1);
10. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penetapan Desa dan Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2001 Nomor 4 Seri D.4);
11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PEDOMAN TIPOLOGI KECAMATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.
3. Tipologi Kecamatan adalah penggolongan kecamatan berdasarkan kriteria tertentu.
4. Indikator Tipologi Kecamatan adalah data atau kriteria untuk menentukan tipologi kecamatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penetapan tipologi kecamatan yaitu :

- a. sebagai bahan rujukan dan referensi dalam melaksanakan kebijakan penetapan tipologi kecamatan;
- b. sebagai landasan dalam penyusunan perencanaan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkompeten dalam meningkatkan kapasitas kecamatan.

Pasal 3

Tujuan penetapan tipologi kecamatan yaitu :

- a. tersusunnya indikator-indikator yang objektif yang diperlukan untuk melaksanakan evaluasi dan menetapkan tipologi kecamatan;
- b. terbentuknya tipologi kecamatan baru yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang disesuaikan dengan kondisi objektif, potensi organisasi dan potensi wilayah kerja kecamatan.

BAB III TIPOLOGI KECAMATAN

Pasal 4

- (1) Tipologi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Kecamatan Tipe A;
 - b. Kecamatan Tipe B;
 - c. Kecamatan Tipe C.
- (2) Penetapan Tipologi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penghitungan indikator.
- (3) Penghitungan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar untuk menetapkan tipologi kecamatan berdasarkan skala interval, bobot dan skor sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Penetapan Tipologi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV INDIKATOR TIPOLOGI KECAMATAN

Pasal 5

Indikator tipologi kecamatan didasarkan pada :

- a. Faktor Umum.
- b. Faktor Teknis.

Pasal 6

Faktor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :

- a. Luas Wilayah;
- b. Jumlah Penduduk;
- c. Jumlah Desa/Kelurahan;
- d. Jumlah Anggaran Kecamatan;
- e. Pengembangan Wilayah/Tata Ruang.

Pasal 7

Faktor Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :

- a. Bidang Pemerintahan;
- b. Bidang Sosial;
- c. Bidang Ekonomi;
- d. Bidang Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Bidang Pelayanan Umum.

Pasal 8

Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari :

- a. Jumlah Aparatur Kecamatan;
- b. Jarak ibukota kecamatan ke ibukota Kabupaten;
- c. Jumlah RT dan RW;
- d. Jumlah Kepala Keluarga;
- e. Tingkat Kepadatan Penduduk;
- f. Laju Pertumbuhan Penduduk;
- g. Panjang Jalan Desa;
- h. Panjang Jalan Kabupaten;
- i. Jumlah Bangunan;
- j. Kondisi Prasarana (bangunan) Kantor Kecamatan.

Pasal 9

Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari :

- a. Sektor Pendidikan, meliputi :
 1. Angka Partisipasi Kasar SD/MI;
 2. Angka Partisipasi Murni SD/MI;
 3. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat;
 4. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat;
 5. Angka Rata-Rata Lama Sekolah;
 6. Angka Melek Huruf.
- b. Sektor Kesehatan, meliputi :
 1. Angka Harapan Hidup;
 2. Angka Kematian Ibu;
 3. Angka Kematian Bayi;
 4. Jumlah Puskesmas/Pustu/Klinik/Polindes.
 5. Jumlah Dokter dan Bidan Praktek.
 6. Jumlah Apotek/Toko Obat.
- c. Sektor Kesejahteraan, meliputi :
 1. Jumlah Keluarga Miskin.
 2. Jumlah Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR).
 3. Jumlah Angkatan Kerja.
 4. Jumlah Sarana Keagamaan.

Pasal 10

Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri dari :

- a. Indeks Daya Beli;
- b. Target retribusi dan pajak daerah yang dilimpahkan kepada kecamatan;
- c. Target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- d. Jumlah Objek Wisata;
- e. Jumlah Hotel dan Restoran;
- f. Jumlah Toko/Warung/Rumah Makan;
- g. Jumlah Pasar/Swalayan;
- h. Jumlah Industri Kecil, Sedang dan Besar;
- i. Jumlah Koperasi;
- j. Luas Lahan Sawah.

Pasal 11

Bidang Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri dari :

- a. Potensi Rawan Bencana Alam.
- b. Komposisi Penduduk/Heterogenitas (Menurut Suku, Agama dan Ras).
- c. Jumlah Tindakan Kriminalitas.
- d. Jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Jumlah Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas);
- f. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan;
- g. Angka Partisipasi Pemilih dalam Pemilu.

Pasal 12

Bidang Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, terdiri dari :

- a. Jumlah Pelayanan KTP dan KK.
- b. Jumlah Pelayanan Keterangan Waris.
- c. Jumlah Pelayanan IMB;
- d. Jumlah Pelayanan HO;
- e. Jumlah Pelayanan Akta Tanah;
- f. Jumlah Pelayanan Kredit Verbant;
- g. Jumlah Pelayanan Rekomendasi Ijin Rame-Rame.

BAB IV

TATA CARA PENGHITUNGAN PENENTUAN TIPOLOGI KECAMATAN

Pasal 13

Tata cara penghitungan penentuan tipologi kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V
EVALUASI

Pasal 14

Untuk mengetahui perkembangan pembangunan dari wilayah kecamatan diadakan evaluasi 5 (lima) tahun sekali.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sumedang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Tipologi Kecamatan dan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Tipologi Kecamatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang.
pada tanggal 28 September 2009

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 28 September 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Cap/ttd

ATJE ARIFIN ABULLAH

BERITA DAERAH KABUPTEN SUMEDANG
TAHUN 2009 NOMOR 91
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 91 TAHUN 2009
 Tanggal : 28 September 2009
 Tentang : PEDOMAN TIPOLOGI KECAMATAN

**TATA CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR
 TIPOLOGI KECAMATAN DI KABUPATEN SUMEDANG**

A FAKTOR UMUM

NO	STANDAR INDIKATOR	SKALA INTERVAL	BOBOT	SKOR
1	2	3	4	5
1.	Luas Wilayah a. < 4.050 Km ² b. 4.050 - 5.500 Km ² c. > 5.500 Km ²	4 7 10	4	
2.	Jumlah Penduduk a. < 27.000 orang b. 27.000 - 37.000 orang c. > 37.000 orang	4 7 10	4	
3.	Jumlah Desa/Kelurahan a. < 10 Desa/Kelurahan b. 10 - 11 Desa/Kelurahan c. > 11 Desa/Kelurahan	4 7 10	4	
4.	Jumlah Anggaran Kecamatan a. < 815.000.000 b. 815.000.000 - 1.000.000.000 c. > 1.000.000.000	4 7 10	4	
5.	Pengembangan Wilayah/Tata Ruang a. Lokal b. Regional c. Nasional	4 7 10	4	
	Jumlah		20	

A. Jumlah skor untuk Faktor Umum (FU):

- Skor terendah : 80
- Skor sedang : 140
- Skor tertinggi : 200

B FAKTOR TEKNIS

NO	STANDAR INDIKATOR	SKALA INTERVAL	BOBOT	SKOR
1	2	3	4	5
	A. Bidang Pemerintahan			
1.	Jumlah Aparatur Kecamatan a. < 34 orang b. 34 - 38 c. > 38 orang	4 7 10	1,6	
2.	Jumlah RT dan RW a. < 280 RT/RW b. 280 - 370 RT/RW c. > 370 RT/RW	4 7 10	1,6	
3.	Jumlah Kepala Keluarga a. < 8.200 KK b. 8.200 - 11.550 KK c. > 11.550 KK	4 7 10	1,6	
4.	Tingkat Kepadatan Penduduk a. < 440 org/km ² b. 440 - 865 org/km ² c. > 865 org/km ²	4 7 10	1,6	
5.	Laju Pertumbuhan Penduduk a. < 1,70 % b. 1,70 - 1,95 % c. > 1,95 %	4 7 10	1,6	
6.	Jumlah Bangunan Rumah a. < 8.300 rumah b. 8.300 -16.000 rumah c. >16.000 rumah	4 7 10	1,6	
7.	Kondisi Prasarana (bangunan) Kantor Kecamatan a. Rusak b. Cukup c. Baik	4 7 10	1,6	
8.	Orbitasi/jarak ibukota Kecamatan ke ibukota Kabupaten a. < 13 Km b. 13 - 25 Km c. > 25 Km	4 7 10	1,6	
9.	Panjang Jalan Desa a. < 43 Km b. 43 - 85 Km c. > 85 Km	4 7 10	1,6	
10.	Panjang Jalan Kabupaten a. < 15 Km b. 22 - 24 Km c. > 24 Km	4 7 10	1,6	
	Jumlah		16	
1	2	3	4	5

	B. Bidang Sosial			
	a) Sektor Pendidikan			
1.	Angka Partisipasi Kasar SD/MI a. < 95 % b. 95 - 105,5 % c. > 105,5 %	4 7 10	1,6	
2.	Angka Partisipasi Murni SD/MI a. < 84,70 % b. 84,70 - 99,00 % c. > 99,00 %	4 7 10	1,6	
3.	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs a. < 60,85% b. 60,85 - 80,00 % c. > 80,00 %	4 7 10	1,6	
4.	Angka Partisipasi Murni SMP/MTS a. < 47 % b. 56 - 65,70 % c. > 65,70 %	4 7 10	1,6	
5.	Angka Rata-rata Lama Sekolah a. < 6,80 tahun b. 6,80 - 7,57 tahun c. > 7,57 tahun	4 7 10	1,6	
6.	Angka Melek Huruf a. < 99,15 % b. 99,15 - 99,60 % c. > 99,60 %	4 7 10	1,6	
	b) Sektor Kesehatan			
1.	Angka Harapan Hidup a. < 66,50 Tahun b. 66,50 - 67,70 Tahun c. > 67,70 Tahun	4 7 10	1,6	
2.	Angka Kematian Ibu a. >1,00 b. 0,1 - 1,00 c. 0	4 7 10	1,6	
3.	Angka Kematian bayi a. >1,6 b. 0,1 - 1,6 c. 0	4 7 10	1,6	
4.	Jumlah Puskesmas/Pustu, Polindes dan Poliklinik a. < 10 unit b. 10 - 15 unit c. > 15 Unit	4 7 10	1,6	
1	2	3	4	5

5.	Jumlah Dokter dan Bidan Praktek a. < 10 orang b. 10 - 15 orang c. > 15 orang	4 7 10	1,6	
6.	Jumlah Apotek dan Toko Obat a. < 2 unit b. 2 - 3 unit c. > 3 unit	4 7 10	1,6	
	c) Sektor Kesejahteraan Sosial			
1.	Jumlah Keluarga Miskin a. < 2.400 orang b. 2.400 - 4.400 orang c. > 4.400 orang	4 7 10	1,6	
2.	Jumlah Jemaah Haji a. < 5 orang b. 5 - 15 orang c. > 15 orang	4 7 10	1,6	
3.	Jumlah Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR) a. < 150 orang b. 150 - 360 orang c. > 360 orang	4 7 10	1,6	
4.	Jumlah Sarana Keagamaan a. < 100 unit b. 100 - 229 unit c. > 229 unit	4 7 10	1,6	
	Jumlah		25,6	
	C. Bidang Ekonomi			
1.	Indeks Daya Beli a. < 60,15 b. 60,15 - 61,00 c. > 61,00	4 7 10	1,6	
2.	Target Pajak Bumi dan Bangunan a. < Rp. 180.000.000 b. 180.000.000 - 337.000 c. > Rp. 337.000.000	4 7 10	1,6	
3.	Target Retribusi Daerah yang telah dilimpahkan ke Kecamatan a. < Rp. 4.000.000 b. Rp. 4.000.000 - Rp. 6.900.000 c. > Rp. 6.900.000	4 7 10	1,6	
4.	Jumlah Koperasi a. < 3 unit b. 3 - 5 unit c. > 5 unit	4 7 10	1,6	
1	2	3	4	5

5.	Jumlah Industri Kecil, Sedang dan Besar a. < 36 unit b. 36 - 130 unit c. > 130 unit	4 7 10	1,6	
6.	Jumlah Toko/Warung/Rumah makan a. < 200 unit b. 200 - 412 unit c. > 412 unit	4 7 10	1,6	
7.	Jumlah Pasar Swalayan a. < 1 unit b. 1 - 2 unit c. > 2 unit	4 7 10	1,6	
8.	Luas Lahan Sawah a. < 800 Km2 b. 800 - 1.400 Km2 c. > 1.400 Km2	4 7 10	1,6	
9.	Jumlah Obyek Wisata a. 1 unit b. 2 - 3 unit c. > 3 unit	4 7 10	1,6	
10.	Jumlah Hotel dan Restoran a. < 1 unit b. 1 - 3 unit c. > 3 unit	4 7 10	1,6	
	Jumlah		16	
	D. Bidang Ketentraman dan Ketertiban			
1.	Potensi Rawan Bencana Alam a. < 4 Kejadian b. 4 - 10 Kejadian c. > 10 Kejadian	4 7 10	1,6	
2.	Komposisi penduduk/Heterogenitas (menurut agama, ras, suku) a. Homogin b. Heterogin	7 10	1,6	
3.	Jumlah Tindak kriminalitas a. < 3 Kejadian b. 4 - 7 Kejadian c. > 7 Kejadian	4 7 10	1,6	
4.	Jumlah Anggota Satpol PP a. < 6 orang b. 6 - 7 orang c. > 7 orang	4 7 10	1,6	
1	2	3	4	5

5.	Jumlah Anggota Linmas a. < 110 orang b. 110 - 220 orang c. > 220 orang	4 7 10	1,6	
6.	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan a. < 7 unit b. 7 - 15 unit c. > 15 Unit	4 7 10	1,6	
7.	Angka Partisipasi Pemilih dalam Pemilu (%) a. < 78 % b. 78 % - 83 % unit c. > 83 %	4 7 10	1,6	
	Jumlah		11,2	
	E. Bidang Layanan Umum			
1.	Jumlah Layanan KTP dan KK Penduduk a. < 4.700 buah b. 4.700 - 9.200 buah c. > 9.200 buah	4 7 10	1,6	
2.	Jumlah Layanan Keterangan Waris a. < 4 buah b. 4 - 10 buah c. > 10 buah	4 7 10	1,6	
3.	Jumlah Layanan IMB a. < 7 buah b. 7 - 20 buah c. > 20 buah	4 7 10	1,6	
4.	Jumlah Layanan HO a. < 5 buah b. 5 - 10 buah c. > 10 buah	4 7 10	1,6	
5.	Jumlah Layanan Akta Tanah a. < 50 buah b. 50 - 145 buah c. > 145 buah	4 7 10	1,6	
6.	Jumlah Layanan Kredit Verbant a. < 145 buah b. 145 - 260 buah c. > 260 buah	4 7 10	1,6	
7.	Jumlah Layanan Ijin Rame-rame a. < 69 buah b. 69 - 115 buah c. > 115 buah	4 7 10	1,6	
	Jumlah		11,2	
	Jumlah Faktor Teknis (A+B+C+D+E)	80		
	Jumlah Faktor Umum dan Faktor Teknis) ..	100		

B. Jumlah skor untuk Faktor Teknis (FT):

1. Bidang Pemerintahan
 - Skor terendah : 64
 - Skor sedang : 112
 - Skor tertinggi : 160

2. Bidang Sosial
 - Skor terendah : 102,4
 - Skor sedang : 179,2
 - Skor tertinggi : 256,0

3. Bidang Ekonomi
 - Skor terendah : 70,4
 - Skor sedang : 123,2
 - Skor tertinggi : 176,0

4. Bidang Ketentraman dan Ketertiban
 - Skor terendah : 44,8
 - Skor sedang : 78,4
 - Skor tertinggi : 112,0

5. Bidang Layanan Umum
 - Skor terendah : 38,4
 - Skor sedang : 67,2
 - Skor tertinggi : 96,0

C. Penentuan Tipologi Kecamatan :

1. Tipe A : Total Skor (FU+FT) > 740
2. Tipe B : Total Skor (FU+FT) 650-740
3. Tipe C : Total Skor (FU+FT) < 650

BUPATI SUMEDANG,

DON MURDONO

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : Tahun 2009
 Tanggal : Mei 2009
 Tentang : PEDOMAN PENETAPAN TIPOLOGI KECAMATAN

**TATA CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR
 TIPOLOGI KECAMATAN DI KABUPATEN SUMEDANG**

C FAKTOR UMUM

NO	STANDAR INDIKATOR	SKALA INTERVAL	BOBOT	SKOR
1	2	3	4	5
1.	Luas Wilayah a. < 5200 Km2 b. 5001 - 6000 Km2 c. > 6000 Km2	4 7 10	4	
2.	Jumlah Penduduk a. < 33.500 orang b. 33.500 - 40.000 orar c. > 40.000 orang	4 7 10	4	
3.	Jumlah Desa/Kelurahan a. < 10 Desa/Kel b. 10 - 11 Desa/K c. > 11 Desa/Kel	4 7 10	4	
4.	Jumlah Anggaran Kecamatan a. b. c	4 7 10	4	
5.	Pengembangan Wilayah/Tata Ruang a. Lokal b. Regiona c. Nasiona	4 7 10	4	
	Jumlah		20	

A. Jumlah skor untuk Faktor Umum (FU):

- Skor terendah : 80
- Skor sedang : 140
- Skor tertinggi : 200

D FAKTOR TEKNIS

NO	STANDAR INDIKATOR	SKALA INTERVAL	BOBOT	SKOR
1	2	3	4	5
	A. Bidang Pemerintahan			
1.	Jumlah Aparatur Kecamatan a. < 35 orang b. 35 - 38 orang c. > 38 orang	4 7 10	1,6	
2.	Jumlah RT dan RW a. < 325 RT/RW b. 325 - 390 RT/RW c. > 390 RT/RW	4 7 10	1,6	
3.	Jumlah Kepala Keluarga a. < 11.000 KK b. 11.000 - 14.000 KK c. > 14.000 KK	4 7 10	1,6	
4.	Tingkat Kepadatan Penduduk a. b. c	4 7 10	1,6	
5.	Laju Pertumbuhan Penduduk a. < 1,85 % b. 1,85 - 1,97 % c. > 1,97 %	4 7 10	1,6	
6.	Jumlah Bangunan Rumah a. < 9.000 rumah b. 9.000 -15.100 rumah c. >15.100 rumah	4 7 10	1,6	
7.	Kondisi Prasarana (bangunan) Kantor Kecamatan a. Rusak b. Cukup c. Baik	4 7 10	1,6	
8.	Orbitasi/jarak ibukota Kecamatan ke ibukota Kabupaten a. < 13 Km b. 13 - 20 Km	4 7 10	1,6	

	c. > 20 Km			
9.	Panjang Jalan Desa a. < 70 Km b. 70 - 104 Km c. > 104 Km	4 7 10	1,6	
10.	Panjang Jalan Kabupaten a. < 22 Km b. 22 - 30 Km c. > 30 Km	4 7 10	1,6	
	Jumlah		16	
	B. Bidang Sosial			
	a) Sektor Pendidikan			
1.	Angka Partisipasi Kasar SD/MI a. b. c.	4 7 10	1,6	
2.	Angka Partisipasi Murni SD/MI a. b. c.	4 7 10	1,6	
3.	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs a. b. c.	4 7 10	1,6	
4.	Angka Partisipasi Murni SMP/MTS a. < 56 % b. 56 - 69 % c. > 69 %	4 7 10	1,6	
5.	Angka Rata-rata Lama Sekolah a. < 7,39 tahun b. 7,39 - 7,60 tahun c. > 7,60 tahun	4 7 10	1,6	
6.	Angka Melek Huruf a. < 99,40 % b. 99,40 - 99,66 % c. > 99,66 %	4 7 10	1,6	
	b) Sektor Kesehatan			
1.	Angka Harapan Hidup a. < 67 Tahun b. 67 - 68 Tahun c. > 68 Tahun	4 7 10	1,6	
2.	Angka Kematian Ibu a. b. c.	4 7 10	1,6	
3.	Angka Kematian bayi a.	4		

	b.	7	1,6	
	c.	10		
4.	Jumlah Puskesmas/Pustu , Polindes dan Poliklinik a. < 14 unit b. 14 - 17 unit c. > 17 Unit	4 7 10	1,6	
5.	Jumlah Dokter dan Bidan Praktek a. < 14 orang b. 14 - 20 orang c. > 20 orang	4 7 10	1,6	
6.	Jumlah Apotek dan Toko Obat a. < 2 unit b. 2 - 3 unit c. > 3 unit	4 7 10	1,6	
	c) Sektor Kesejahteraan Sosial			
1.	Jumlah Keluarga Miskin a. < 3.600 orang b. 3.600 - 5.500 orang c. > 5.500 orang	4 7 10	1,6	
2.	Jumlah Jemaah Haji a. < 11 orang b. 11 - 25 orang c. > 25 orang	4 7 10	1,6	
3.	Jumlah Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR) a. < 300 orang b. 300 - 400 orang c. > 400 orang	4 7 10	1,6	
4.	Jumlah Sarana Keagamaan a. < 175 unit b. 175 - 274 unit c. > 274 unit	4 7 10	1,6	
	Jumlah		25,6	
	C. Bidang Ekonomi			
1.	Indeks Daya Beli a. < 60,60 b. 60,60 - 61,17 c. > 61,17	4 7 10	1,6	
2.	Target Pajak Bumi dan Bangunan a. < Rp. 300.000.000 b. 300.000.000 - 370.000.000 c. > Rp. 370.000.000	4 7 10	1,6	
3.	Target Retribusi Daerah yang telah dilimpahkan ke Kecamatan a. b. c.	4 7 10	1,6	

4.	Jumlah Koperasi a. b. c.	4 7 10	1,6	
5.	Jumlah Industri Kecil, Sedang dan Besar a. < 80 unit b. 80 - 160 unit c. > 160 unit	4 7 10	1,6	
6.	Jumlah Toko/Warung/Rumah makan a. < 380 unit b. 380 - 500 unit c. > 500 unit	4 7 10	1,6	
7.	Jumlah Pasar Swalayan a. b. c.	4 7 10	1,6	
8.	Luas Lahan Sawah a. < 1.070 Km ² b. 1.070 - 1.600 Km ² c. > 1.600 Km ²	4 7 10	1,6	
9.	Jumlah Obyek Wisata a. 1 unit b. 2 unit c. > 3 unit	4 7 10	1,6	
10.	Jumlah Hotel dan Restoran a. b. c.	4 7 10	1,6	
	Jumlah		16	
	D. Bidang Ketentraman dan Ketertiban			
1.	Potensi Rawan Bencana Alam a. < 6 Kejadian b. 6 - 10 Kejadian c. > 10 Kejadian	4 7 10	1,6	
2.	Komposisi penduduk/Heterogenitas (menurut agama, ras, suku) a. Homogin b. Heterogin	7 10	1,6	
3.	Jumlah Tindak kriminalitas a. < 3 Kejadian b. 4 - 8 Kejadian c. > 8 Kejadian	4 7 10	1,6	
4.	Jumlah Anggota Satpol PP a. < 7 orang	4		

	b. 7 orang c. > 7 orang	7 10	1,6	
5.	Jumlah Anggota Linmas a. < 160 orang b. 160 - 230 orang c. > 240 orang	4 7 10	1,6	
6.	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan a. < 11 unit b. 11 - 17 unit c. > 117 Unit	4 7 10	1,6	
7.	Angka Partisipasi Pemilih dalam Pemilu (%) a. < 80 % b. 80 % - 84 % unit c. > 84 %	4 7 10	1,6	
	Jumlah		11,2	
	E. Bidang Layanan Umum			
1.	Jumlah Layanan KTP dan KK Penduduk a. < 8.400 buah b. 8.400 - 14.000 buah c. > 14.000 buah	4 7 10	1,6	
2.	Jumlah Layanan Keterangan Waris a. b. c.	4 7 10	1,6	
3.	Jumlah Layanan IMB a. < 9 buah b. 9 - 23 buah c. > 23 buah	4 7 10	1,6	
4.	Jumlah Layanan HO a. < 8 buah b. 8 - 13 buah c. > 13 buah	4 7 10	1,6	
5.	Jumlah Layanan Akta Tanah a. < 130 buah b. 130 - 169 buah c. > 169 buah	4 7 10	1,6	
6.	Jumlah Layanan Kredit Verbant a. < 220 buah b. 220 - 270 buah c. > 270 buah	4 7 10	1,6	
7.	Jumlah Layanan Ijin Rame-rame a. < 105 buah b. 105 - 130 buah c. > 130 buah	4 7 10	1,6	

	Jumlah		11,2	
	Jumlah Faktor Teknis (A+B+C+D+E)	80		
	Jumlah Faktor Umum dan Faktor Teknis) ..	100		

B. Jumlah skor untuk Faktor Teknis (FT):

6. Bidang Pemerintahan

- Skor terendah : 64
- Skor sedang : 112
- Skor tertinggi : 160

7. Bidang Sosial

- Skor terendah : 102,4
- Skor sedang : 179,2
- Skor tertinggi : 256,0

8. Bidang Ekonomi

- Skor terendah : 70,4
- Skor sedang : 123,2
- Skor tertinggi : 176,0

9. Bidang Ketentraman dan Ketertiban

- Skor terendah : 44,8
- Skor sedang : 78,4
- Skor tertinggi : 112,0

10. Bidang Layanan Umum

- Skor terendah : 38,4
- Skor sedang : 67,2
- Skor tertinggi : 96,0

Jumlah total skor untuk Faktor Teknis (FT):

- Skor terendah : 320
- Skor sedang : 560
- Skor tertinggi : 800

BUPATI SUMEDANG,

H.DON MURDONO

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : Tahun 2009.
 Tanggal : Mei 2009.
 Tentang : PEDOMAN PENETAPAN TIPOLOGI KECAMATAN

TATA CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR
 TIPOLOGI KECAMATAN DI KABUPATEN SUMEDANG

A. FAKTOR UMUM.

NO.	STANDAR INDIKATOR	SKALA INTERVAL	BOBOT	SKOR
1	2	3	4	5
1	Luas Wilayah (Ha) a. b. c.	4 7 10	4	
2	Jumlah Penduduk (Jiwa) a. b. c.	4 7 10	4	
3	Jumlah Desa/Kelurahan a. b. c.	4 7 10	4	
4	Jumlah Anggaran Kecamatan a. b. c.	4 7 10	4	
5	Pengembangan Wilayah / Tata Ruang a. b. c.	4 7 10	4	
JUMLAH			20	

Jumlah Skor untuk Faktor Umum (FU)

- a. Skor Rendah : 80
- b. Skor Sedang : 140
- c. Skor Tinggi : 200

B. FAKTOR TEKNIS.

1. Bidang Pemerintahan;

NO	STANDAR INDIKATOR	SKALA INTERV AL	BOBOT	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah Aparatur Kecamatan a. b. c.	4 7 10	1,6	
2	Jumlah RT dan RW a. b. c.	4 7 10	1,6	
3	Jumlah Kepala Keluarga a. b. c.	4 7 10	1,6	
4	Tingkat Kepadatan Penduduk a. b. c.	4 7 10	1,6	
5	Laju Pertumbuhan Penduduk a. b. c.	4 7 10	1,6	
6	Jumlah Bangunan Rumah a. b. c.	4 7 10	1,6	
7	Kondisi Prasarana (bangunan) Kantor Kecamatan a. b. c.	4 7 10	1,6	
8	Orbitasi Jara Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten a. b. c.	4 7 10	1,6	

1	2	3	4	5
9	Panjang Jalan Desa			
	a.	4	1,6	
	b.	7		
	c.	10		
10	Panjang Jalan Kabupaten			
	a.	4	1,6	
	b.	7		
	c.	10		
JUMLAH			16	

Jumlah Skor untuk Bidang Pemerintahan

- a. Skor Rendah : 64
- b. Skor Sedang : 112
- c. Skor Tinggi : 160

2. Bidang Sosial

NO	STANDAR INDIKATOR	SKALA INTERV AL	BOBOT	SKOR
1	2	3	4	5
1	Angka Partisipasi Kasar SD/MI			
	a.	4	1,6	
	b.	7		
	c.	10		
2	Angka Partisipasi Murni SD/MI			
	a.	4	1,6	
	b.	7		
	c.	10		
3	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs			
	a.	4	1,6	
	b.	7		
	c.	10		
4	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs			
	a.	4	1,6	
	b.	7		
	c.	10		
5	Angka Rata-Rata Lama Sekolah			
	a.	4	1,6	
	b.	7		
	c.	10		

1	2	3	4	5
6	Angka Melek Huruf a. b. c.	4 7 10	1,6	
7	Angka Harapan Hidup a. b. c.	4 7 10	1,6	
8	Angka Kematian Ibu a. b. c.	4 7 10	1,6	
9	Angka Kematian Bayi a. b. c.	4 7 10	1,6	
10	Jumlah Puskesmas/Pustu/Klinik/Polindes a. b. c.	4 7 10	1,6	
11	Jumlah Dokter dan Bidan Praktek a. b. c.	4 7 10	1,6	
12	Jumlah Apotek/Toko Obat a. b. c.	4 7 10	1,6	
13	Jumlah Keluarga Miskin a. b. c.	4 7 10	1,6	
14	Jumlah Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTRC) a. b. c.	4 7 10	1,6	
15	Jumlah Angkatan Kerja a. b. c.	4 7 10	1,6	

1	2	3	4	5
16	Jumlah Sarana Keagamaan			
	a.	4	1,6	
	b.	7		
	c.	10		
JUMLAH			25,6	

Jumlah Skor untuk Bidang Sosial

- a. Skor Rendah : 102,4
- b. Skor Sedang : 179,2
- c. Skor Tinggi : 256

3. Bidang Ekonomi

NO	STANDAR INDIKATOR	SKALA INTERV AL	BOBOT	SKOR
1	2	3	4	5
1	Indek Daya Beli			
	a.	4	1,6	
	b.	7		
	c.	10		
2	Target Retribusi dan Pajak Daerah yang dilimpahkan kepada Kecamatan			
	a.	4	1,6	
	b.	7		
	c.	10		
3	Target Pajak Bumi dan Bangunan			
	a.	4	1,6	
	b.	7		
	c.	10		
4	Jumlah Objek Wisata			
	a.	4	1,6	
	b.	7		
	c.	10		
5	Jumlah Hotel dan Restoran			
	a.	4	1,6	
	b.	7		
	c.	10		
6	Jumlah Toko / Warung / Rumah Makan			
	a.	4	1,6	
	b.	7		
	c.	10		

1	2	3	4	5
7	Jumlah Pasar / Swalayan			
	a.	4	1,6	
	b.	7		
	c.	10		
8	Jumlah Industri Kecil, Sedang dan Besar			
	a.	4	1,6	
	b.	7		
	c.	10		
9	Jumlah Koperasi			
	a.	4	1,6	
	b.	7		
	c.	10		
10	Luas Lahan Sawah (Ha)			
	a.	4	1,6	
	b.	7		
	c.	10		
JUMLAH			26	

Jumlah Skor untuk Bidang Ekonomi

- a. Skor Rendah : 70,4
- b. Skor Sedang : 123,2
- c. Skor Tinggi : 176

4. Bidang Ketentraman dan Ketertiban

NO	STANDAR INDIKATOR	SKALA INTERV AL	BOBOT	SKOR
1	2	3	4	5
1	Potensi Rawan Bencana Alam			
	a.	4	1,6	
	b.	7		
	c.	10		
2	Komposisi Penduduk/Heterogenitas			
	a.	4	1,6	
	b.	7		
	c.	10		
3	Jumlah Tindakan Kriminalitas			
	a.	4	1,6	
	b.	7		
	c.	10		

1	2	3	4	5
4	Jumlah Anggota SATPOL – PP			
	a.	4	1,6	
	b.	7		
	c.	10		
5	Jumlah Anggota LINMAS			
	a.	4	1,6	
	b.	7		
	c.	10		
6	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan			
	a.	4	1,6	
	b.	7		
	c.	10		
7	Jumlah Partisipasi Pemilih dalam Pemilu			
	a.	4	1,6	
	b.	7		
	c.	10		
JUMLAH			11,2	

Jumlah Skor untuk Bidang Ketentraman dan Ketertiban

- a. Skor Rendah : 44,8
- b. Skor Sedang : 78,4
- c. Skor Tinggi : 112

5. Bidang Pelayanan Umum

NO	STANDAR INDIKATOR	SKALA INTERV AL	BOBOT	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah Pelayanan KTP dan KK			
	a.	4	1,6	
	b.	7		
	c.	10		
2	Jumlah Pelayanan Keterangan Waris			
	a.	4	1,6	
	b.	7		
	c.	10		
3	Jumlah Pelayanan IMB			
	a.	4	1,6	
	b.	7		
	c.	10		

1	2	3	4	5
4	Jumlah Pelayanan HO			
	a.	4	1,6	
	b.	7		
	c.	10		
5	Jumlah Pelayanan Akta Tanah			
	a.	4	1,6	
	b.	7		
	c.	10		
6	Jumlah Pelayanan Kredit Verbant			
	a.	4	1,6	
	b.	7		
	c.	10		
7	Jumlah Pelayanan Rekomendasi Ijin Rame-Rame			
	a.	4	1,6	
	b.	7		
	c.	10		
JUMLAH			11,2	

Jumlah Skor untuk Bidang Pelayanan Umum

- a. Skor Rendah : 38,4
- b. Skor Sedang : 67,2
- c. Skor Tinggi : 96

Jumlah Skor untuk Faktor Teknis (FT)

- a. Skor Rendah : 320
- b. Skor Sedang : 560
- c. Skor Tinggi : 800

BUPATI SUMEDANG,

DON MURDONO.